

### **BAB III**

## **PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN BANTUL**

### **A. Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan pada Mitigasi Bencana di Kabupaten Bantul**

#### **1. Perencanaan Bappeda pada mitigasi bencana**

Dalam mitigasi bencana, Bappeda mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut terlihat dalam tugas dan fungsinya. Dimana Bappeda Kabupaten Bantul membuat perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam RPJMD dan RPJD bersama SKPD Kabupaten Bantul serta beberapa LSM yang ada untuk bersama-sama menanggulangi bencana alam.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*) Kabupaten Bantul, BAPPEDA memasukkan pembahasan terkait dengan penanggulangan bencana, hal ini merupakan bentuk dari keseriusan dan kesadaran pemerintah Kabupaten Bantul akan ancaman bencana di daerah mereka, sehingga mereka memasukkan kedalam isu-isu strategis termasuk di dalam RPJMD Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

#### **a. Kekuatan**

- i. Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan bencana.**

- ii. Karakteristik masyarakat yang identik dengan budaya gotong royong.
  - iii. Adanya peraturan daerah tentang badan penanggulangan bencana daerah kemudian disebut BPBD.
  - iv. Adanya dokumen perencanaan yang berbasis mitigasi bencana.
- b. Kelemahan
- i. Kabupaten Bantul berada pada kawasan rawan bencana
  - ii. Sosialisasi tentang mitigasi bencana belum optimal.
  - iii. Sistem peringatan dini terhadap bencana belum optimal
  - iv. Keterbatasan SDM yang menangani kebencanaan
  - v. Keterbatasan sarana dan prasarana
- c. Peluang
- i. Kabupaten bantul memiliki akses ke dunia Internasional pasca terjadinya bencana gempa bumi.
  - ii. Banyaknya teknologi tentang peringatan dini bencana.
- d. Tantangan
- i. Kabupaten Bantul dilewati oleh sesar opak.
  - ii. Banyaknya daerah di sekitar yang potensial terkena bencana
- e. Isu Strategi

Dalam RPJMD (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*), BAPPEDA menggunakan tiga strategi pada penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul, yaitu sistem manajemen mitigasi bencana, peningkatan kapasitas SDM yang menangani bencana,

pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi bencana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BAPPEDA lebih memprioritaskan pada strategi sistem manajemen mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana di kabupaten Bantul. Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi BAPPEDA adalah sebagai pembuat kebijakan dan regulasi, oleh karena itu peran BAPPEDA pada mitigasi bencana ini sebagai jembatan antar SKPD untuk selanjutnya mengeluarkan kebijakan yang informasinya bersumber dari SKPD yang ada.<sup>20</sup>

i. Kebijakan Bappeda pada mitigasi bencana

Dalam pembuatan program-program mitigasi bencana ini BAPPEDA tidak hanya bekerja sendiri, namun ada beberapa instansi lain yang memberikan masukan atau rekomendasi terkait mitigasi bencana, seperti BPBD (*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*) karena lembaga inilah yang dianggap paling mengerti terkait mitigasi bencana, kemudian BAPPEDA juga memiliki tugas untuk memonitoring langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Selain itu terkait pembangunan infrastruktur BAPPEDA juga bekerja sama dengan Dinas PU (*pembangunan umum*) Kabupaten Bantul untuk mengawal dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul terkait mitigasi bencana baik dalam tahap pembuatan peraturan atau regulasi yang merupakan wilayah BAPPEDA maupun dalam tahap

---

<sup>20</sup>RPJMD (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*). Tahun 2011-2015

implementasi yang merupakan wilayah dinas pembangunan umum. Seperti misalnya untuk mendirikan sebuah bangunan gedung ataupun suatu bangunan yang kompleks dalam artian rumit dan membutuhkan biaya serta fungsional, BAPPEDA mengeluarkan pengesahan dokumen sebagai syarat dan standar bangunan gedung yang memiliki pondasi yang kokoh, sebagai bentuk antisipasi penanggulangan bencana.<sup>21</sup>

Namun diakui oleh BAPPEDA Kabupaten Bantul bahwa untuk mengontrol pembangunan rumah pribadi memang belum terlaksana, dikarenakan masih terlalu luas untuk menjangkau hal tersebut. Sebagai terusan dari program-program tersebut, BAPPEDA kabupaten Bantul juga telah melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar, seperti penghijauan kawasan rawan longsor di kecamatan Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, dan Pandak dan sekitar pantai, pembuatan lubang-lubang serapan air serta memperbanyak ruang terbuka hijau di kecamatan Srandakan, Sewon, dan Kasihan, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih seperti pembuatan sumur pante atau sumur bor untuk memperoleh air, penyediaan air minum dengan mobil tangki dan penyediaan pompa air di kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret,

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bpk Arif Budi Nugroho dan Bpk Priyanto selaku kabid dan kepala Sub kabid sarana dan prasarana BAPPEDA Kabupaten Bantul.

Imogiri, dan Pundong, karena hampir setiap tahun kabupaten Bantul mengalami kekeringan. Bappeda kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan untuk menanggulangi gempa bumi, berupa pembangunan infrastruktur umum yang memiliki standar kualitas tinggi, penetapan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi, seperti di kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Jetis, Banguntapan dan Piyungan.

Sedangkan untuk penanggulangan bencana tsunami BAPPEDA dan BPBD Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi serta pembuatan peta jalur evakuasi dan peringatan dini pada masyarakat di kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek yang merupakan kawasan rawan bencana Tsunami.

Kemudian untuk pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana dilakukan pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko, dan pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

Adapun kebijakan-kebijakan yang di tempuh oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam perencanaan pembangunan pada mitigasi bencana seperti :

- 1) Pengembangan struktur ruang melalui pemantapan, pengembangan hirarki sistem perkotaan, dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana ke seluruh Kabupaten Bantul.
- 2) Pengembangan pola ruang untuk kawasan lindung, budidaya, dan kawasan strategis dengan memperhatikan antara lain: Pemeliharaan, perwujudan kelestarian lingkungan hidup
- 3) Penetapan daerah rawan bencana alam dan pembatasan pembangunan di daerah rawan bencana.
- 4) Perwujudan, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya.
- 5) Pengembangan kawasan strategis dengan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai budaya serta pelestarian lingkungan hidup.

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam mendukung kebijakan tersebut adalah:

- 1) Penetapan pusat pertumbuhan wilayah secara berjenjang sesuai dengan potensi.
- 2) Pengembangan sistem transportasi secara terpadu.

- 3) Pembentukan pola ruang dengan menempatkan kawasan lindung, dan kawasan budidaya sehingga terwujud tata ruang yang tertib, teratur, efisien, selaras serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ada beberapa kebijakan penataan ruang pasca bencana alam gempa bumi, adapun bentuk dari kebijakan tersebut diantaranya adalah :

- 1) Pengembangan struktur ruang melalui pemantapan, pengembangan hirarki sistem perkotaan, dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana ke seluruh Kabupaten Bantul.
- 2) Pengembangan pola ruang untuk kawasan lindung, budidaya, dan kawasan strategis dengan memperhatikan antara lain :
  - Pemeliharaan, perwujudan kelestarian hidup.
  - Penetapan daerah rawan bencana alam dan pembatasan pembangunan di daerah rawan bencana.
  - Perwujudan, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya
- 3) Pengembangan kawasan strategis dengan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai budaya serta pelestarian lingkungan hidup.

Dalam mewujudkan kebijakan mitigasi bencana BAPPEDA Kabupaten Bantul telah mengambil langkah strategis sebagai upaya mendukung kebijakan tersebut.

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam mendukung kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan pusat pertumbuhan wilayah secara berjenjang sesuai dengan potensi.
- b. Pengembangan system transportasi secara terpadu.
- c. Pembentukan pola ruang dengan menempatkan kawasan lindung, dan kawasan budidaya sehingga terwujud tata ruang yang tertib, teratur, efisien, selaras, serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. Pengembangan kawasan bencana dengan membatasi pertumbuhan di daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana alam.

Untuk pembangunan berbasis pengurangan resiko bencana, BAPPEDA Kabupaten Bantul merencanakan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- a. Pada daerah-daerah yang terletak pada sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman warga masyarakat ataupun fasilitas umum, karena akan sangat berbahaya jika tetap melakukan pembangunan baik tempat tinggal maupun fasilitas umum. Adapun rencana pembangunan fasilitas umum harus memenuhi ketentuan (IMB) yang telah ditetapkan oleh



Bappeda kabupaten Bantul, seperti ; suatu bangunan gedung yang akan dibangun misalnya harus memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) yaitu sertifikat yang diterbitkan Pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan suatu bangunan baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.<sup>22</sup>

- b. Pada daerah-daerah yang terletak pada sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, seperti bangunan rumah warga, sekolah, tempat-tempat ibadah, rumah sakit/puskemas, serta rumah-rumah produksi ataupun toko-toko (fasilitas umum). Walaupun daerah yang memiliki tingkat rawan sedang bukan berarti daerah tersebut aman dari ancaman bencana gempa bumi, karena walau bagaimanapun Kabupaten bantul secara keseluruhan merupakan daerah rawan bencana gempa bumi.
- c. Pada daerah-daerah yang terletak di sesar/wilayah dengan rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga, bahkan kantor siaga bencana. Hal ini merupakan bentuk dari kerjasama antara Pemerintah kabupaten Bantul bersama dengan masyarakat Kabupaten Bantul sebagai upaya kesadaran akan ancaman bencana gempa bumi untuk kemudian bersama-sama melibatkan diri serta menjaga keamanan.

---

<sup>22</sup>Peraturan daerah Kabupaten Bantul No.5 tahun 2011 tentang bangunan gedung.

### Program Bappeda pada mitigasi bencana

Selain merencanakan beberapa kebijakan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Bantul juga membuat program-program pada mitigasi bencana sebagai lanjutan dari kebijakan tersebut. Adapun perencanaan pembangunan yang di rumuskan oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam mitigasi bencana yang berupa program-program kemudian akan di tindaklanjuti oleh SKPD sesuai dengan skrupnya masing-masing, seperti dibawah ini :

- i. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
- ii. Program perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
- iii. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- iv. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
- v. Program pengendalian banjir.
- vi. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social.
- vii. Program pencegahan dini dan penyebaran informasi potensi bencana alam.
- viii. Program pengembangan perumahan.
- ix. Program pembangunan jalur evakuasi.
- x. Program pembangunan prasarana umum.
- xi. Program pengelolaan dan rehabilitas ekosistem pesisir dan laut.

Dalam pembuatan program-program mitigasi bencana ini BAPPEDA kabupaten Bantul tidak bekerja sendiri, namun ada beberapa instansi lain yang memberikan kontribusi atau rekomendasi terkait mitigasi bencana, seperti BPBD (*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*) karena BPBD merupakan sebuah badan di daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait bencana maupun mitigasi bencana.

Selain itu terkait pembangunan infrastruktur BAPPEDA telah bekerja sama dengan dinas PU (*Pembangunan Umum*) Kabupaten Bantul, tujuan dari kerja sama ini yaitu untuk mengawal dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bantul, terkait mitigasi bencana baik dalam tahap pembuatan regulasi yang nantinya akan diimplementasikan baik di wilayah BAPPEDA maupun wilayah dinas Pembangunan Umum.

Dalam implementasi regulasi tersebut misalnya mengatur tentang mendirikan sebuah bangunan gedung ataupun suatu bangunan yang kompleks, sehingga BAPPEDA mengeluarkan dokumen pengesahan sebagai syarat dan standar bangunan gedung yang memiliki pondasi yang kokoh, sebagai bentuk antisipasi penanggulangan bencana.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bpk Ari Budi Nugroho dan Bpk Priyanto selaku kabid dan kepala Sub kabid sarana dan prasarana BAPPEDA Kabupaten Bantul.

## **2. Pembangunan Mitigasi Bencana**

### **a. Infrastruktur**

Sebagai terusan dari program-program tersebut, BAPPEDA kabupaten Bantul juga telah melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar, seperti penghijauan kawasan rawan longsor di kecamatan Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, dan Pandak dan sekitar pantai, pembuatan lubang-lubang serapan air serta memperbanyak ruang terbuka hijau di kecamatan Srandakan, Sewon, dan Kasihan, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih seperti pembuatan sumur pante atau sumur bor untuk memperoleh air, penyediaan air minum dengan mobil tangki dan penyediaan pompa air di kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong, karena hampir setiap tahun kabupaten Bantul mengalami kekeringan. Bappeda kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan untuk menanggulangi gempa bumi, berupa pembangunan infrastruktur umum yang memiliki standar kualitas tinggi, penetapan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi, seperti di kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Jetis, Banguntapan dan Piyungan.

### **b. Masyarakat**

Namun secara umum upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul sudah dilakukan secara menyeluruh meliputi semua

lapisan yang ada di Kabupaten bantul, baik dari elemen pemerintah Kabupaten Bantul beserta SKPD yang ada dan masyarakat bantul itu sendiri. Hal ini terbukti dengan terbentuknya desa siaga bencana di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, ada kerjasama yang terjalin antara Pemerintah daerah Kabupaten Bantul sebagai pemangku kebijakan dengan masyarakat Bantul yang di arahkan dan di bina terkait kegiatan mitigasi bencana di Kabupaten Bantul. Bahkan di beberapa tempat di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul sudah memiliki titik aman berkumpul ketika terjadinya bencana, seperti penunjuk arah jalur evakuasi dan tempat aman untuk berkumpul dan berlindung saat terjadinya bencana.

Pada konteks kurikulum pendidikan yang berkaitan dengan hal mitigasi bencana di kabupaten bantul memang belum ada, tetapi bukan berarti tidak ada informasi ataupun pelatihan penanggulangan bencana di sekolah-sekolah di Bantul, hanya saja pelatihan yang dilakukan belum termasuk ke dalam jumlah sks ataupun dalam bentuk mata pelajaran wajib, tetapi lebih kedalam bentuk ekstrakurikuler seperti pada saat jam olahraga ataupun kegiatan pramuka. Akan tetapi ada beberapa sekolah yang dijadikan *pilot project* sekolah siaga bencana di Kabupaten Bantul seperti SD di parangtritis, SMP di Kecamatan Imogiri II, dan SMA di kecamatan Kretek.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Wawancara bersama Bpk Purwanto kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan BAPPEDA Kabupaten Bantul, Tanggal 12 oktober Pkl 11.15 WIB.

Pembentukan sekolah siaga bencana tersebut adalah berdasarkan karena daerah tersebut merupakan rawan bencana, seperti SD Parangtritis dan SMA Kretek adalah daerah rawan bencana gempa yang disusul tsunami, sedangkan SMP II Imogiri adalah merupakan daerah rawan longsor. Untuk ketiga sekolah tersebut sudah diberlakukan kurikulum terkait siaga bencana sedangkan di beberapa sekolah lain belum dilaksanakan, namun target BAPPEDA kabupaten Bantul dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul adalah nantinya semua sekolah yang ada sudah merupakan sekolah siaga bencana.

Sebenarnya pembangunan infrastruktur umum di Kabupaten Bantul cukup memadai, seperti Rumah sakit umum, namun untuk istilah rumah sakit siaga bencana memang tidak ada, tapi beberapa rumah sakit di kabupaten Bantul sudah memiliki infrastruktur yang cukup baik, dan rata-rata sudah memiliki ruang UGD (unit gawat darurat) yang memadai. Selain itu rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul sudah di bekali kesiapan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman bencana.<sup>25</sup>

Dalam hal pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki standar dan syarat tertentu untuk izin mendirikan suatu bangunan di Kabupaten Bantul, seperti yang tertuang pada Perda kabupaten Bantul No.5 Tahun 2011. Didalam perda tersebut dijabarkan dengan jelas bahwa bangunan gedung baik yang akan digunakan

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bpk Purwanto Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan BAPPEDA Kabupaten Bantul, Tanggal 12 oktober Pkl 11.15 WIB

sebagai fasilitas umum ataupun bangunan yang bersifat perorangan dan kelompok harus memiliki standar dan syarat yang berlaku. Seperti contohnya suatu bangunan yang komplek dalam artian fungsi maupun bentuknya harus memiliki standar keamanan, keselamatan akan ancaman bencana, semisal harus memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) yaitu suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan baik secara administratif maupun fungsinya sebelum pemanfaatannya, hal ini tertuang pada perda Kabupaten Bantul no.5 thn 2011 pasal 1 ayat 27.

## **B. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Mitigasi Bencana di Kabupaten Bantul**

Perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya kegiatan mitigasi bencana tidak seutuhnya merupakan ruang lingkup BPBD, dalam artian misalnya pembangunan talud ataupun saluran irigasi oleh dinas pekerjaan umum, pada awalnya hal tersebut adalah merupakan suatu bentuk kegiatan mitigasi bencana, namun pada tataran eksekusinya bukan pada BPBD melainkan dinas pekerjaan umum.

Hal tersebut merupakan bentuk dari sebuah kordinasi antar SKPD yang berlaku di Kabupaten Bantul terkait mitigasi bencana, BAPPEDA sebagai induk SKPD mengajak seluruh SKPD yang ada untuk kemudian bersama-sama merumuskan kebijakan pada mitigasi bencana yang selanjutnya pada

tahap eksekutor adalah SKPD yang dianggap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BPBD merupakan organisasi resmi pemerintah untuk menggantikan peran SATKORLAK/SATLAK PB yang bersifat koordinatif dan fungsional, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpadu dan menyeluruh. BPBD Kabupaten Bantul melaksanakan tugas dan kewajibannya guna mewujudkan lingkungan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Didalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemda Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran per tahun yang di ambil dari APBD

Berdasarkan keyakinan tersebut BPBD Bantul akan memberikan kontribusi dalam pengurangan resiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya bencana bagi semua pelaku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan bencana. Kondisi kapasitas di sektor pendidikan dilakukan dengan membangun sekolah-sekolah bagi masyarakat baik oleh pemerintah daerah, swasta, dan lainnya. Sarana pendidikan yang memadai akan dapat memacu peningkatan kualitas dari sumber daya manusia terutama bagi generasi muda. Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menjelang dan menghadapi era globalisasi, terutama menghadapi pasar bebas.

Peningkatan mutu SDM diharapkan pula bersamaan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki SDM. Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Bantul mulai dari pendidikan non-formal (PAUD dan



TK) sampai dengan perguruan tinggi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, serta kursus-kursus keterampilan yang semakin banyak berkembang di Bantul.

Adapun langkah-langkah yang di tempuh oleh BPBD Kabupaten Bantul pada kondisi kesiapsiagaan, sebagai berikut :

### **1. Pengkajian Resiko Bencana**

Pada tahun 2012 BPBD Kabupaten Bantul bekerja sama dengan World Bank, BAPPEDA Bantul, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dan Dinas Sumber Daya Air Bantul telah membuat Kajian Daerah Rawan Longsor di 8 Desa Kabupaten Bantul, yaitu Desa Girirejo, Karangtengah, Mangunan, Muntuk, Seloharjo, Selopiamoro, Sriharjo dan Srimulyo. Di Kabupaten Bantul secara umum desa-desa yang rawan longsor terletak pada morfologi hingga perbukitan di wilayah timur dari Kabupaten Bantul. Desa-desa ini seakan merupakan lereng batas antara morfologi dataran rendah (graben) Yogyakarta dengan morfologi dataran tinggi Wonosari di bagian timur.

### **2. Perencanaan Kontinjensi**

Kontinjensi didefinisikan sebagai *“Proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah, atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi”*. (Panduan Kontinjensi Dalam

*menghadapi Bencana, BNPB 2011*). Kabupaten Bantul telah memiliki beberapa rencana kontinjensi bencana diantaranya :

- a. Rencana Kontinjensi Tsunami pada tahun 2007
- b. Rencana Kontinjensi Banjir pada tahun 2012

Rencana Kontinjensi Banjir yang dibuat tahun 2012, adapun ruang lingkup cakupan luasan ancaman banjir rencana Kontinjensi ini dibatasi oleh batas administrasi wilayah Kabupaten Bantul yang dilewati 3 sungai besar, Sungai Progo, Sungai Oya dan Sungai Opak, serta 4 muara sungai kecil, sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, Sungai Bedog dan Sungai Code, Serta kawasan rawan banjir yang meliputi 14 kecamatan dan 38 desa.

Dalam rencana kontinjensi banjir ini, pelaku penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 6 (enam) sektor dengan deskripsi seperti dibawah ini:<sup>26</sup>

- a. Sektor Evakuasi dan Penyelamatan (SAR)

Pada sektor ini, BPBD sebagai kordinator dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti Polri, SAR Kabupaten Bantul, Dinsos Bantul (TAGANA), PMI, Satpol PP (Linmas), TRC BPBD, dan FPRB Bantul.

Adapun Kebijakan Sektor ini, yaitu ; Terkoordinasinya Evakuasi dan SAR dengan semua sektor, Fungsi evakuasi dan SAR terselenggara dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan

---

<sup>26</sup>Dokumen BPBD. *kondisi kesiapsiagaan Kabupaten Bantul*.

penanganan korban, Terselenggaranya penyediaan tempat pengungsian (Barak, Tenda), Terkoordinasiannya penanganan pengungsi dan korban pasca evakuasi dan penyelamatan (SAR).

b. Sektor Posko, Manajemen Data, dan Infokom

Pada sektor ini, BPBD sebagai kordinator dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti ; Humas Pemda Bantul, BAPPEDA, ORARI, TNI/POLRI, dan DISHUB KPDT. Kebijakan Sektor, yaitu ;

Kebijakan pada sektor ini, yaitu : Optimalisasi koordinasi dengan semua sektor, terkelolanya POSKO, Manajemen Data, informasi dan komunikasi, dan terpenuhinya kebutuhan databagi seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana.

c. Sektor Logistik, Transportasi, Sarana dan Prasarana

Pada sektor ini, BPBD sebagai kordinator dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti : DISHUB, PU, PLN, PDAM, SDA, TNI/POLRI/ Badan Ketahanan Pangan.

Kebijakan Sektor, yaitu : terpulihkannya sarana dan prasarana seperti transportasi, kesehatan dan MCK, terwujudnya penyediaan sarana-prasarana pada tempat pengungsian seperti penerangan, air bersih dan pos kesehatan, dan tertanganinya permasalahan yang mengganggu akses publik.

d. Sektor Keamanan

Pada sektor ini, BPBD sebagai kordinator dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti : TNI,Satpol PP, Kesbangpollinmas, FKPM, DISHUB, Forum PRB Bantul.

Kebijakan Sektor, yaitu : Koordinasi dengan semua sector, Sterilisasi dan pengamanan lingkungan lokasi banjir, Mengtasi kekacauan dengan membantu meluruskan informasi informasi menyesatkan, Harta benda masyarakat yang terkena musibah banjir, Mengamankan bantuan logistic, Aktifnya posko PAM di lokasi kejadian, Aktifnya PAM Swakarsa lingkungan.

e. Sektor Kesehatan

Pada sektor ini, BPBD sebagai kordinator dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti : RSUD Panembahan Senopati dan RS swasta di Bantul, PDAM, PU, BKK PP, PMI Tagana dan Pramuka. Kebijakan dalam Sektor ini, yaitu :Memastikan kesiapan instrumen penanganan bencana sektor kesehatan yakni:

- i. Fasilitas umum
- ii. Fasilitas kesehatan
- iii. Fasilitas komunikasi
- iv. Fasilitas Trasnportasi

Selain itu kebijakan sektor itu juga sebagai berikut ; mendekatkan pelayanan kesehatan kepada korban banjir, pengamatan terhadap potensi wabah penyakit serta masalah penyakit lainnya, mengaktifkan

sistem emergency kesehatan, Menyiapkan logistik, Koordinasi dengan sektor lainya.

f. Sektor Sosial Ekonomi

Pada sektor ini, BPBD sebagai kordinator dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindagkop, Dinas Pendidikan dasar, Dinas Pendidikan menengah dan Non Formal. Adapun kebijakan pada sektor, yaitu : kegiatan sektor menyasar sekolah, pertanian perikanan, peternakan, usaha, peribadatan dan pemerintahan, yaitu:

- i. Tersedotnya luapan banjir
- ii. Upaya agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan
- iii. Kegiatan peribadatan tetap berjalan
- iv. Kegiatan jual beli tetap berjalan
- v. Kegiatan perekonomian dan perkantoran tetap berjalan.<sup>27</sup>

**3. Koordinasi Antar Pemangku**

Penanganan bencana di Kabupaten Bantul tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BPBD.Seluruh pemangku kepentingan, lembaga usaha dan masyarakat yang peduli terhadap ancaman bencana harus saling bahu membahu.Beberapa kegiatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul diantaranya :

---

<sup>27</sup>*ibid.*

a. Penyusunan Rencana Kontinjensi

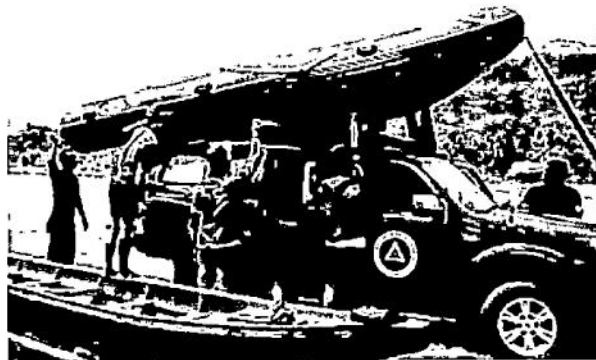
Salah satu wujud kerangka kerja pengurangan risiko bencana adalah perlunya upaya strategis melalui suatu perencanaan yang dilakukan secara terintegrasi lintas pelaku dan pemangku kepentingan berupa rencana kesiapsiagaan bencana.

- b. Mengadakan workshop Pengembangan Budaya Sadar Bencana Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk pengembangan budaya sadar bencana di Kabupaten Bantul. Hal ini dilakukan guna menyadarkan dan mengajak masyarakat secara keseluruhan untuk peduli dan selalu siap siaga akan ancaman bencana. Seperti misalnya mengadakan workshop, pelatihan simulasi saat terjadinya bencana.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BPBD kabupaten Bantul pada mitigasi bencana, sebagai berikut :

- i. Pelatihan Penanganan Bencana Banjir

**Gambar 3.1**  
**Pelatihan Penanganan Bencana Banjir**



Sumber : BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2010

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Bantul, mengadakan pelatihan penanganan bencana yang diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari Pemadam Kebakaran (PBK), Tim Reaksi Cepat (TRC), dan Search and Rescue (SAR). Kegiatan pelatihan pengoperasian perahu dilakukan tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi petugas BPBD Kabupaten Bantul dalam penggunaan/ pengoprasian perahu karet sebagai salah satu peralatan Penanggulangan Bencan (PB), dengan demikian diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan SDM dan berperan aktif secara teknis dalam pengguna sarana evakuasi korban bencana di perairan.

ii. Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi

**Gambar 3.2**  
**Simulasi Penanganan Bencana Gempa Bumi**



Sumber : BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2010

Simulasi penanganan bencana gempa bumi dan tsunami warga Kretek kabupaten Bantul. Simulasi yang dilangsungkan merupakan agenda Hospital and Community Preparedness for Disaster

Management (HCPDM) bersama warga Bantul terutama masyarakat Kretek, tujuan utama dari diadakannya simulasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tim DMC PKU Bantul dalam menangani bencana di lapangan, serta menciptakan kesiapsiagaan masyarakat dan memberikan pembelajaran langsung tentang prosedur evakuasi dan transportasi serta manajemen pendirian posko. Dalam simulasi tersebut RS PKU Bantul berkerjasama dengan, Polisi Kretek, Koramil Kretek, PMI Bantul, Puskesmas Kretek, BP PKU Muhammadiyah Parangtritis, Relawan Siaga Bencana Muhammadiyah Kretek, Dinas Sosial, SAR Parangtritis, dan Relawan Muhammadiyah Srandakan.

iii. Simulasi Penanganan Tsunami Drill

Pada penanggulangan tsunami BPBD kabupaten Bantul bekerja sama dengan GTZ menyelenggarakan Tsunami drill. Acara tersebut yang diadakan pada melibatkan tiga dusun, yaitu Dusun Ngepet, Karanganyar dan Tegalrejo, seperti yang terlihat dibawah ini :

**Gambar 3.3**  
**Simulasi Penanganan Tsunami Drill**



Sumber : BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2010



Salah satu tujuan diadakan Tsunami Drill ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat, aparat pemerintah daerah, serta personnel stakeholder terkait dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.

Pada kenyataannya korelasi atau komunikasi antar SKPD di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik, terlebih kaitannya dengan penanggulangan bencana atau mitigasi bencana. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya beberapa perda yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Terkait perda yang berkaitan dengan mitigasi bencana yang dikeluarkan oleh BAPPEDA itu adalah merupakan hasil masukan dari BPBD Bantul dan beberapa SKPD lain yang terkait seperti dinas PU (pekerjaan umum). Selain itu dukungan dari masyarakat secara menyeluruh juga merupakan faktor penunjang program-program dan kebijakan yang dikeluarkan dalam hal mitigasi bencana.

Bencana gempa bumi di tahun 2006 silam memang tidak dapat dipungkiri sebagai suatu peringatan bahwa daerah Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan ancaman bencana yang cukup besar, oleh karena itu ketangguhan dan keseriusan pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan sangat berperan besar akan keselamatan dan keamanan masyarakat bantul secara menyeluruh.